

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu ideologi negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Beberapa tafsiran muncul sebagai tanggapan terhadap peristiwa sejarah atau perubahan sikap masyarakat, sementara tafsiran lain mungkin berkembang sebagai hasil penemuan ilmiah atau kemajuan teknologi.¹

Dalam beberapa kasus, satu individu mungkin bertanggung jawab atas perkembangan suatu ideologi, sementara dalam kasus lain, ini mungkin merupakan hasil dari upaya kolaboratif di antara sekelompok pemikir. Seiring waktu, ketika aliran pemikiran memperoleh pengikut dan praktisi, ia dapat mengembangkan dan menyempurnakan teori dan prinsipnya, beradaptasi dengan perkembangan dan tantangan baru di lapangan.²

Bagi pihak negara, pemikiran dan pengamalan ideologi negara oleh rakyatnya sangat penting, karena di situ menandakan adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan itu, bahkan dianjurkan untuk diturunkan kepada generasi muda seperti mahasiswa. Walaupun demikian, pelibatan mahasiswa dalam pembangunan ideologi negara merupakan hal yang kompleks, dengan berbagai potensi keuntungan dan kerugiannya. Di satu sisi, melibatkan mahasiswa dalam pengembangan ideologi negara dapat memberi mereka rasa memiliki dan investasi dalam proses politik. Ini juga dapat membantu memastikan bahwa ideologi tersebut mencerminkan nilai dan kepedulian kaum muda, yang seringkali kurang terwakili dalam pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, melibatkan mahasiswa dalam proses pembinaan ideologi itu dapat membantu mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan keterlibatan sipil mereka, yang dapat bermanfaat bagi partisipasi mereka di masa depan dalam proses politik.³

¹ James C Ungureanu, *Science, Religion, and the Protestant Tradition: Retracing the Origins of Conflict* (University of Pittsburgh Press, 2019).

² Baojun Pan, "The Origin and Evolution of Philosophy of Technology: Comments on The Thoughtful History of Philosophy of Technology: Review of The Thoughtful History of Philosophy of Technology, Edited by Chen Fan and Zhu Chunyan," *Techné: Research in Philosophy and Technology* 26, no. 1 (2022): 197–206.

³ Michalinos Zembylas, "The Affective Modes of Right-Wing Populism: Trump Pedagogy and Lessons for Democratic Education," *Studies in Philosophy and Education* 39, no. 2 (2020): 151–66.

Di sisi lain, ada juga kelemahan potensial untuk melibatkan mahasiswa dalam pengembangan ideologi negara. Misalnya, mahasiswa mungkin tidak memiliki keahlian atau pengalaman yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif pada pengembangan ideologi yang koheren dan efektif. Selain itu, melibatkan mahasiswa dalam proses tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk mengindoktrinasi mereka ke dalam ideologi politik tertentu, alih-alih mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mandiri.⁴

Namun, jelas bahwa keterlibatan semacam itu harus dilakukan secara transparan dan demokratis, dengan tujuan mendorong pemikiran kritis dan keterlibatan sipil di kalangan anak muda. Inilah yang baru-baru ini kurang dikembangkan pada sosialisasi dan partisipasi publik ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu, penggalan data sejauhmana penghayatan dan pengamalan Pancasila pada tingkat mahasiswa sangat penting dilakukan, untuk kemudian dapat dijadikan rekomendasi pada tingkat kebijakan pihak pemerintah.⁵

Sementara itu, di negeri pluralistik seperti Indonesia, dialog antaragama memainkan peran penting dalam membentuk ideologi negara dan partisipasi politik dengan memupuk pemahaman, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai di antara komunitas agama yang berbeda. Bentuk dialog ini merupakan percakapan berkelanjutan yang menghormati kontradiksi dan saling mengesampingkan antar berbagai keyakinan agama, tanpa bertujuan untuk menciptakan keseragaman. Hal ini dapat membantu mengurangi peran agama dalam politik global dan merekrut massa untuk tujuan yang salah.⁶

Dialog antaragama semakin dianggap sebagai faktor penting dalam politik, yang berkontribusi terhadap keberhasilan kolaborasi dan pembangunan perdamaian yang efektif. Hal ini juga dapat memperkaya argumen politik dengan wawasan teologis, sehingga menghasilkan keberagaman agama yang lebih bermakna dan terjamin. Dengan mendorong pemahaman yang lebih baik antar komunitas agama,

⁴ Michel Croce, "Exemplarism in Moral Education: Problems with Applicability and Indoctrination," *Journal of Moral Education* 48, no. 3 (2019): 291–302.

⁵ Lucinda Allen Mosher, "The Episcopal Church Religious Manyess: Steps toward a Theology," *Anglican Theological Review* 96, no. 1 (2014): 57–72.

⁶ Andreas Hasenclever and Volker Rittberger, "Does Religion Make a Difference? Theoretical Approaches to the Impact of Faith on Political Conflict," *Millenium* 29, no. 3 (2000): 641–74, <https://doi.org/10.1177/03058298000290031401>.

dialog antaragama dapat mengatasi penyebab perang dan berkontribusi pada pengembangan ideologi negara yang lebih inklusif.⁷

Keterlibatan mahasiswa dalam membangun ideologi negara melalui gotong royong antar pemuda dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dialog antaragama, kesukarelaan, dan gotong royong. Dialog antaragama dapat membantu menumbuhkan pemahaman, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai di antara komunitas agama yang berbeda, sehingga berkontribusi pada pengembangan ideologi negara yang lebih inklusif.⁸

Kesukarelaan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam pengabdian masyarakat dan mendapatkan pengalaman kepemimpinan, berkontribusi pada pengembangan rasa tanggung jawab sipil dan kesadaran sosial. Saling membantu dapat membantu siswa mengatasi permasalahan sosial dan membangun solidaritas, memungkinkan mereka bereksperimen dengan struktur pengasuhan yang dapat menentukan nasib sendiri yang mulai menawarkan solusi terhadap permasalahan sosial.⁹

Mahasiswa juga dapat terlibat dalam partisipasi politik dengan mendorong perubahan kurikulum dalam bidang studinya masing-masing, sehingga berkontribusi pada pengembangan ideologi negara yang lebih inklusif dan beragam.¹⁰ Ringkasnya, keterlibatan mahasiswa dalam membangun ideologi negara melalui gotong royong antar pemuda dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dialog antaragama, kesukarelaan, gotong royong, dan mendorong perubahan kurikulum dalam bidang studinya masing-masing.

Oleh karena itu, mahasiswa dapat berperan sebagai alat penting dalam pengembangan ideologi negara dan peningkatan partisipasi politik berdasarkan rasa saling menghormati dan kerja sama antar kelompok agama yang berbeda. Adapun kelompok mahasiswa yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas berbasis keagamaan di Bandung. Bandung dipilih karena kurangnya pemberitaan, namun sebetulnya cukup tenang untuk menjadi tempat kajian falsafah bangsa seperti Pancasila ini. Di Bandung ini, terdapat setidaknya

⁷ Zoran Brajovic, "The Potential of Inter-Religious Dialogue," *Peace Building and Civil Society in Bosnia-Herzegovina. Ten Years after Dayton*, 2007, 185–214.

⁸ Renee Garfinkel, *What Works?: Evaluating Interfaith Dialogue Programs* (Diane Publishing, 2008).

⁹ Daniel Tillapaugh, "Student Involvement and Engagement," in *Rethinking College Student Development Theory Using Critical Frameworks* (Routledge, 2019), 191–205.

¹⁰ Paul Byron, *Digital Media, Friendship and Cultures of Care* (Routledge, 2020).

ada dua universitas berbasis keagamaan, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati; dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Kedua universitas ini cukup mewakili untuk universitas berbasis keagamaan, karena di UIN ada fakultas keagamaan untuk calon-calon ahli di bidang keagamaan (seperti Fak. Ushuluddin) dan di Unpar ada Fakultas Filsafat, yang termasuk di dalamnya ada program studi untuk para calon pastor. Alasan lain adalah bahwa mahasiswa kedua universitas ini cukup aktif dalam wacana dan aktivisme nasional, termasuk Pancasila dan pelibatan dalam problem-problem nasional. Ada tokoh-tokoh pergerakan, terutama zaman peralihan Orde Baru ke Reformasi yang muncul dari kedua kampus tersebut. Dengan demikian, segala hal dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila di tingkat mahasiswa dapat dengan serta merta tercakup dengan pengambilan data dari mahasiswa di kedua universitas tersebut.

Oleh karena itu, judul yang akan diambil penulis adalah, “Partisipasi Mahasiswa dalam Pengembangan Pancasila sebagai Ideologi Negara (Kajian atas Penghayatan dan Pengamalan Mahasiswa Berbasis Keagamaan Islam dan Katolik di Bandung).”

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam kajian ini:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa berbasis keagamaan Islam dan Katolik di Bandung tentang Pancasila sebagai ideologi negara?
2. Bagaimana bentuk ide-ide mahasiswa berbasis keagamaan Islam dan Katolik di Bandung tentang pengamalan Pancasila?
3. Bagaimana perbandingan ide-ide mahasiswa berbasis keagamaan Islam dan Katolik di Bandung tentang keterlibatan agama dalam pengembangan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pemahaman mahasiswa berbasis keagamaan Islam dan Katolik di Bandung tentang Pancasila sebagai ideologi negara.
2. Menganalisis bentuk ide-ide mahasiswa berbasis keagamaan Islam dan Katolik di Bandung tentang pengamalan Pancasila.

3. Mencari perbandingan ide-ide mahasiswa berbasis keagamaan Islam dan Katolik di Bandung tentang keterlibatan agama dalam pengembangan Pancasila.

D. Pertanyaan Penelitian

Berikut adalah beberapa pertanyaan utama yang dapat membantu mengukur partisipasi mahasiswa dalam pengembangan Pancasila:

1. Seberapa tertarik Anda dengan Pancasila dan ideologi negara? Apakah Anda merasa bahwa suara kaum muda terwakili dalam pengembangan ideologi negara?
2. Pernahkah Anda berpartisipasi dalam kegiatan diskusi yang membahas Pancasila?
3. Pernahkah Anda diminta untuk memberikan tanggapan atau masukan atas kebijakan atau inisiatif pemerintah terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Jika demikian, dapatkah Anda menggambarkan pengalaman itu?
4. Apakah Anda merasa ada hambatan bagi partisipasi kaum muda dalam wacana pengembangan Pancasila? Jika ya, menurut Anda apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
5. Menurut Anda, seberapa penting keterlibatan generasi muda dalam pembangunan ideologi negara? Mengapa atau mengapa tidak?
6. Apakah Anda merasa bahwa universitas Anda memberikan kesempatan bagi Anda untuk belajar tentang Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan? Jika demikian, dapatkah Anda menjelaskan peluang-peluang ini?
7. Pernahkah Anda menerima pelatihan atau pendidikan tentang bagaimana terlibat dalam menyuarakan penghayatan dan pengamalan Pancasila? Jika pernah, dapatkah Anda menggambarkan pengalaman itu?
8. Menurut Anda, peran apa yang dapat dimainkan kaum muda dalam membentuk ideologi negara? Strategi atau pendekatan apa yang menurut Anda paling efektif?
9. Apakah Anda merasa bahwa pemerintah atau pembuat kebijakan mendengarkan perspektif dan keprihatinan anak muda? Mengapa atau mengapa tidak?
10. Perubahan apa yang ingin Anda lihat dalam bagaimana kaum muda terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan perkembangan ideologi negara?

E. Kerangka Pemikiran

Teori keterlibatan sipil generasi muda, teori keterlibatan masyarakat, teori partisipasi politik, dan teori sosialisasi adalah beberapa teori yang dapat membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam perkembangan ideologi negara.

Teori keterlibatan sipil generasi muda (*youth civic engagement theory*) menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda dalam pengambilan keputusan politik dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk membangun demokrasi yang kuat dan mempromosikan keadilan sosial.¹¹ Dalam konteks ini, partisipasi mahasiswa dalam pengembangan ideologi negara dapat dilihat sebagai bentuk keterlibatan sipil yang mempromosikan kewarganegaraan aktif dan partisipasi demokratis. Teori keterlibatan sipil ini menjadi *grand theory* dalam penulisan disertasi ini.

Agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman dan perilaku keterlibatan sipil kaum muda. Di antara cara di mana agama dapat bersinggungan dengan teori keterlibatan sipil generasi muda adalah keterlibatan masyarakat (*community involvement*).¹² Di sini lembaga keagamaan dapat memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan masyarakat dan keadilan sosial. Keterlibatan ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan mempromosikan komitmen untuk keterlibatan sipil. Teori keterlibatan masyarakat ini menjadi *middle-range theory* dalam penulisan disertasi ini.

Untuk menjelaskan teori keterlibatan masyarakat ini, diperlukan teori aplikasi (*applied theory*)-nya, yaitu teori partisipasi politik dan teori sosialisasi. Dengan teori partisipasi politik (*political participation*), lembaga keagamaan dapat menjadi wadah bagi kaum muda untuk terlibat dalam aktivisme dan advokasi politik.¹³ Ini dapat melibatkan perhatian pada isu-isu yang selaras dengan nilai-nilai agama mereka, seperti perlindungan lingkungan atau hak asasi manusia. Kemudian,

¹¹ Laura Wray-Lake and Jennifer Shubert, "Understanding Stability and Change in Civic Engagement across Adolescence: A Typology Approach.," *Developmental Psychology* 55, no. 10 (2019): 2169.

¹² Zhongyuan Zhu et al., "Can Protection Motivation Theory Predict Pro-Environmental Behaviour of Small Rural Tourism Enterprises? An Extended Model Including Community Involvement," *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 27, no. 4 (2022): 428–42.

¹³ Julia Weiss, "What Is Youth Political Participation? Literature Review on Youth Political Participation and Political Attitudes," *Frontiers in Political Science* 2 (2020): 1.

dengan teori sosialisasi (*socialization*), keterlibatan remaja dalam lembaga keagamaan juga dapat mensosialisasikan mereka ke dalam perilaku dan nilai-nilai kemasyarakatan. Ini dapat mencakup paparan layanan masyarakat dan advokasi, serta peluang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi.¹⁴

Dalam hal keterlibatan mahasiswa pada lembaga keagamaan ini adalah adanya inisiatif-inisiatif perdamaian dan dialog antar agama pada mereka. Hal ini karena disadari bahwa Indonesia adalah negara plural.¹⁵ Menurut Keith Ward,

kesadaran mengenai pluralitas agama semakin meruncing atau semakin menajam pada zaman modern. Berkembang dan bertambahnya kesadaran mengenai pluralitas ini salah satunya ditunjang oleh banyaknya kajian dan penelitian-penelitian yang dilakukan, berhubungan dengan berbagai macam agama di dunia. Penelitian dan kajian ini akhirnya mendorong penambahan pengetahuan dan kesadaran mengenai informasi agama-agama yang ada di dunia.¹⁶

Kerangka penelitian yang berbeda mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana mahasiswa berkontribusi pada pembentukan ideologi negara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut, seperti menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah atau lembaga pendidikan, memeriksa hal tersebut pada mahasiswa, mewawancarai dosen, dan melacak pendapat masyarakat.

Beradaptasi dengan kebijakan pemerintah atau lembaga pendidikan memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan ideologi negara. Ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah atau lembaga pendidikan memiliki kebijakan atau pedoman yang mengatur partisipasi mahasiswa dalam pembangunan ideologi negara. Kebijakan ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam proses tersebut dan bagaimana masukan mereka dicari dan dipertimbangkan.

Partisipasi mahasiswa dalam perkembangan ideologi negara dapat juga dilakukan dengan memeriksa kelompok mahasiswa. Di sini bisa dicari kelompok atau organisasi mahasiswa yang terlibat dalam aktivisme atau advokasi politik.

¹⁴ K Andrew R Richards, Colin G Pennington, and Oleg A Sinelnikov, "Teacher Socialization in Physical Education: A Scoping Review of Literature," *Kinesiology Review* 8, no. 2 (2019): 86–99.

¹⁵ Paelani Setia and M Taufiq Rahman, "Socializing Religious Moderation and Peace in the Indonesian Landscape," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 333–40.

¹⁶ Keith Ward, *Religion in the Modern World: Celebrating Pluralism and Diversity*, (New York: Cambridge University Press, 2019), 9-10.

Kelompok-kelompok ini dapat terlibat dalam lobi untuk kepentingan mereka atau berpartisipasi dalam konsultasi publik terkait dengan perkembangan ideologi negara. Dalam hal mahasiswa ini, dapat pula diketahui partisipasi mereka dengan mewawancarai perwakilan mahasiswa. Di sini kita dapat berbicara dengan perwakilan mahasiswa, seperti anggota dewan mahasiswa atau asosiasi mahasiswa. Mereka mungkin memiliki informasi tentang bagaimana mahasiswa terlibat dalam pengembangan ideologi negara atau dapat mengarahkan kita ke sumber daya atau kontak yang relevan.

Kemudian, cara lain untuk mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembentukan ideologi negara adalah dengan melakukan wawancara dengan dosen mereka. Para dosen dalam ilmu politik, studi sosial, atau mata kuliah lain yang relevan mungkin memiliki informasi tentang keterlibatan mahasiswa dalam proses politik atau mungkin memberikan arahan tentang cara mahasiswa dapat berpartisipasi.

Terakhir, dengan mengamati pendapat publik, mahasiswa dapat terlibat dalam pembentukan ideologi negara. Di sini dapat dipertimbangkan apakah pemerintah atau lembaga pendidikan mengadakan forum atau konsultasi publik tentang perkembangan ideologi negara. Konsultasi ini mungkin terbuka untuk siswa berpartisipasi, atau mahasiswa dapat memberikan masukan atau umpan balik kepada lembaga publik.

F. Langkah-langkah Penelitian

Secara umum, metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan mengumpulkan informasi tentang partisipasi mahasiswa dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah menemukan topik atau masalah yang menarik, melakukan tinjauan literatur, menganalisis argumen dan bukti, membandingkan, dan menarik kesimpulan.

Dalam mengidentifikasi topik atau masalah yang menarik, penulis perlu mengidentifikasi topik atau masalah yang ingin dijelajahi. Ini berupa pertanyaan, masalah, atau debat khusus dalam bidang atau disiplin yang melibatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila.¹⁷

¹⁷ Sadaf Fakharzadeh and Corey S Stocco, "A Translational Evaluation of Listener Interest on the Presentation of Conversation Topics to Individuals Who Exhibit Restricted Interests," *Journal of Applied Behavior Analysis* 55, no. 3 (2022): 799–813.

Setelah penulis mengidentifikasi topik, penulis melakukan tinjauan literatur untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi berbagai perspektif dan pengamalan Pancasila. Ini melibatkan langkah-langkah seperti membaca buku, artikel, dan sumber lain yang relevan, dan mencatat argumen dan bukti yang disajikan.¹⁸

Kemudian, penulis menganalisis argumen dan bukti mahasiswa dari kedua universitas berbasis keagamaan yang diteliti setelah mengumpulkan informasi. Di sini, penulis mencoba menemukan analogi dan perbedaan antara asumsi, teori, dan pendekatan mereka.¹⁹

Berdasarkan analisis data, penulis kemudian dapat membandingkan dan membedakan perspektif atau aliran pemikiran yang berbeda. Di sini penulis mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan utama di antara mereka, dan pertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing.²⁰

Akhirnya, berdasarkan perbandingan dan analisis, penulis dapat menarik kesimpulan tentang aliran pemikiran yang berbeda dan implikasinya terhadap masalah yang sedang dihadapi. Ini dapat melibatkan kegiatan mengidentifikasi bidang-bidang persamaan, menyoroti pembahasan atau pertanyaan yang belum terselesaikan, atau menyarankan arah baru untuk penelitian di masa depan.²¹

G. Kajian Terdahulu

Berikut di antara kajian yang sebelumnya sudah dilakukan tentang Pancasila sebagai ideologi negara:

1. Yang pertama mesti dilihat adalah karya Endang Saifuddin Anshari (1981), *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959* (Bandung: Pustaka Salman). Kemudian, yang kontemporer tentang hal ini adalah karya Moch Nur Ichwan (2011),

¹⁸ Mohammad Sharaf Qdah et al., "A Grounded Theory for ICT-Mediated Tacit Knowledge Transferability in MNCs," *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management* 13 (2018): 311–35, <https://doi.org/10.28945/4107>; MT Rahman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁹ Virginia Braun and Victoria Clarke, "One Size Fits All? What Counts as Quality Practice in (Reflexive) Thematic Analysis?," *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (2021): 328–52.

²⁰ Lara Varpio et al., "The Distinctions between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework," *Academic Medicine* 95, no. 7 (2020): 989–94.

²¹ Kathy Charmaz and Linda Liska Belgrave, "Thinking about Data with Grounded Theory," *Qualitative Inquiry* 25, no. 8 (2019): 743–53.

“Secularism, Islam and Pancasila; Political Debates on the Basis of the State in Indonesia,” *Bulletin of the Nanzan Center for Asia-Pacific Studies* 6, pp. 1-43. Kedua karya ilmiah tersebut membahas secara historis perdebatan tentang kelompok nasionalisme religius, dan nasionalisme sekular tentang Pancasila. Hal ini berbeda dengan yang penulis kaji, yaitu kajian kontemporer tentang penghayatan dan pengalaman kaum muda atas Pancasila yang kedudukannya sebagai ideologi negara sudah kokoh.²²

2. Dari sudut pandang hukum, ada artikel Edi Sasmiarti Rusman (2018), “Implementasi Politik Hukum Islam dalam Perumusan Piagam Jakarta,” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, No. 1 (2018) dan J.M. Muslimin (2012), “Islamic Law in the Pancasila State,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12 No. 1. Kedua artikel ini membahas Pancasila dengan pendekatan Ilmu Hukum atas kelahiran Pancasila. Menurut dua artikel ini, pada awalnya rumusan dasar Negara yang termuat di dalam Piagam Jakarta telah mencerminkan adanya pengaruh politik hukum Islam. Akan tetapi kemudian terjadi perubahan berdasarkan konsensus tokoh-tokoh bangsa dengan alasan keutuhan bangsa dan Negara. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Islam Indonesia, sehingga politik hukum Islam benar-benar mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun Indonesia bukan Negara Islam.²³
3. Abdul Mu’ti dan Ahmad Najib Burhani (2019), “The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 9 No. 1. Artikel ini membahas Pancasila dari segi kebebasan beragama. Artikel ini berargumen bahwa Pancasila telah menetapkan Indonesia menjadi negara monoteistik religius, yang memberikan pemerintah piranti yang diperlukan untuk memaksa agama-agama non-teistik, politeistik, dan non-monoteistik untuk memodifikasi keyakinan teologis mereka agar diterima

²² Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis Sekular Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959* (Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981) dan Moch Nur Ichwan, “Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State in Indonesia,” *Bulletin of the Nanzan Center for Asia-Pacific Studies* 6 (2011): 1–43.

²³ Edi Sasmiarti Rusman, “Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan Piagam Jakarta,” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 01 (2018) dan J M Muslimin, “Islamic Law in the Pancasila State,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012).

sebagai agama yang diakui atau resmi. Pancasila juga membenarkan keberadaan favoritisme untuk agama-agama tertentu yang dianggap cocok dengan ideologi ini.²⁴

4. Syafruddin Amir (2013), “Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character,” *International Journal of Scientific & Technology Research* Vol. 2 No. 1, pp. 54-57. Artikel ini membahas Pancasila dari segi pendidikan dan pembentukan karakter. Penulisnya mencoba menyajikan “Keutuhan Filsafat Pancasila Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia” yang diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi pendidikan di Indonesia lebih diwarnai oleh nilai-nilai parsial, tidak terpadu, yang akan dipaparkan oleh beberapa pakar pendidikan di Indonesia.²⁵

H. Bidang dan Ruang Lingkup Kajian

Kajian partisipasi mahasiswa dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi negara ini dapat disandarkan pada teori keterlibatan sipil (*civic engagement*) generasi muda. Ini adalah bidang interdisipliner yang diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial, termasuk sosiologi, ilmu politik, psikologi, pendidikan, dan komunikasi. Studi tentang keterlibatan sipil generasi muda biasanya berfokus pada cara-cara di mana orang muda berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan kegiatan masyarakat, dan bagaimana pengalaman ini berkontribusi pada sosialisasi, pembentukan identitas, dan perasaan mereka sebagai agen perubahan (*agent of change*).²⁶ Teori keterlibatan sipil generasi muda dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji partisipasi mahasiswa dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi negara ini. Ini adalah bidang yang mencakup banyak bidang ilmu sosial, seperti sosiologi, ilmu politik, psikologi, pendidikan, dan komunikasi. Studi tentang keterlibatan sipil generasi muda biasanya berfokus pada cara orang muda berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan pengambilan keputusan politik, serta bagaimana pengalaman ini

²⁴ Abdul Mu'ti and Ahmad Najib Burhani, “The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 111–34.

²⁵ Syafruddin Amir, “Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character,” *International Journal of Scientific & Technology Research* 2, no. 1 (2013): 54–57.

²⁶ Sue Roffey, “Becoming an Agent of Change for School and Student Well-Being,” *Educational & Child Psychology* 32, no. 1 (2015): 21–30.

mempengaruhi sosialisasi, pembentukan identitas, dan perasaan mereka sebagai agen perubahan.

Bidang ini juga berkaitan dengan pemahaman faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterlibatan orang muda sebagai warga negara, dan bagaimana keterlibatan orang muda dapat berkontribusi pada perubahan sosial dan politik yang lebih luas. Secara keseluruhan, bidang teori keterlibatan sipil orang muda dicirikan oleh sifat interdisiplinernya, dan dengan fokusnya pada pemahaman dinamika kompleks yang membentuk partisipasi orang muda dalam kehidupan sipil. Selain itu, bidang ini berkaitan dengan pemahaman tentang apa yang mendorong atau menghambat keterlibatan orang muda sebagai warga negara, serta bagaimana keterlibatan orang muda dapat berkontribusi pada perubahan sosial dan politik yang lebih luas. Secara keseluruhan, bidang teori keterlibatan sipil orang muda berfokus pada interaksi antara berbagai disiplin ilmu dan memfokuskan pada dinamika kompleks yang membentuk partisipasi orang muda dalam kehidupan sipil.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang akan ditulis dengan struktur sebagai berikut.

Beberapa pokok pikiran yang dianggap sebagai latar belakang munculnya masalah dalam penelitian ini dijelaskan pada Bab I (Pendahuluan). Latar belakangnya adalah kurangnya dukungan pengembangan Pancasila di kalangan generasi muda. Mahasiswa pada masa kini tidak tampak memiliki perkembangan sosial yang begitu dinamis dalam menjawab persoalan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kelompok mahasiswa berbasis keagamaan dimunculkan sebagai kelompok yang dapat lebih dekat pada pengembangan Pancasila karena dalam sejarahnya, para agamawan memiliki konsensus yang kontinum dalam memahami bahwa Pancasila berakar pada ideologi keagamaan. Masih dalam bab pendahuluan ini, terdapat penjelasan tentang rumusan masalah, tujuan, makna, metode, bidang dan ruang lingkup, serta batasan penelitian.

²⁷ Carrie Menkel-Meadow, "Uses and Abuses of Socio-Legal Studies," *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, 2019, 35–57.

Bab II mengkaji secara teoretis tentang keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan Pancasila. Kajiannya mengungkap persoalan-persoalan utama tentang Pancasila dan tempatnya dalam kehidupan publik di Indonesia.

Bab III menguraikan secara rinci tentang metodologi yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab yang berisi pembahasan substansial kajian ini adalah bab perbandingan tentang pengembangan Pancasila di kedua kelompok mahasiswa berbasis keagamaan. Pembahasan ini mengisi bab IV.

Terakhir, terdapat Bab V (Kesimpulan dan Saran) sesuai dengan temuan dalam penelitian.

